

## PERANAN SOEHARTO DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)

Oleh :

Ika Frelia, Anggar Kaswati, Sumardiono,

### Abstrak

Berdasarkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Presiden Soekarno melepaskan kekuasaannya sebagai presiden Republik Indonesia sehingga MPRS kemudian menetapkan Jendral Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia menggantikan presiden Soekarno berdasarkan Tap MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968. Sejak tanggal 27 Maret 1968 secara resmi Soeharto menduduki kursi kepresidenan. Presiden Soeharto berusaha mengatasi berbagai krisis ekonomi, politik dan pemerintahan dengan program repelita. Sampai dengan repelita ke enam pemerintah Soeharto mampu mengatasi berbagai krisis, perekonomian membaik, stabilitas politik tercapai, pengangguran berkurang, sehingga kehidupan rakyat sejahtera. Tahun 1997 muncul badai krisis ekonomi di berbagai bidang negara termasuk di Indonesia. Presiden Soeharto berusaha menanggulangi krisis dengan merevisi anggaran negara, menunda perjalanan pejabat ke luar negeri, dan menaikkan tarif dasar listrik. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena hutang luar negeri Indonesia terlalu besar dan banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Kehidupan rakyat Indonesia yang semakin berat akibat berbagai krisis seperti krisis ekonomi, krisis keuangan dan krisis kepemimpinan menyebabkan rakyat bersama mahasiswa mengadakan demonstrasi agar presiden Soeharto melakukan reformasi di berbagai bidang. Karena tidak mampu mengatasi berbagai macam krisis maka presiden Soeharto di tuntut mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah merasa tidak mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negara. Mundurnya Soeharto mengakibatkan reformasi di Indonesia.

**Kata Kunci** : perekonomian, Orde Baru, Soeharto, Indonesia

### Latar Belakang

Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta diumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin (Nugroho Notosusanto, 1993 : 283). Setelah dikeluarkannya dekrit ini, keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketergantungan pemerintahan Soekarno pada militer dirasakan semakin mengkhawatirkan dan untuk menyeimbangkan kekuatan maka Soekarno merangkul

PKI yang ia rasa memiliki kesamaan misi dan cara dalam perjuangan (MC. Ricklefs, 1991 : 383-384).

Kondisi perpolitikan periode 1960 sampai dengan 1965 yang tidak menentu ini diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi. Kemelut ekonomi itu dibarengi dengan kemelut politik dalam wujud persaingan kekuatan yang sengit di dalam negeri, dan kadang konflik-konflik terbuka antar Angkatan Darat dan golongan komunis. Beberapa waktu kemudian, ketika Soekarno mencabut undang-undang darurat pada tahun 1963, golongan komunis tampak meninggalkan strategi “jalan damai” dan berganti dengan tindakan-tindakan radikal ( Mohtar Mas’oed , 1989 : 50-51). Pada puncaknya PKI melakukan kudeta pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan pemberontakan G 30 S/PKI. Pergerakan mereka didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat.

Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto dengan segera mengamankan Jakarta, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Dalam masalah penyelesaian G 30 S/PKI digariskan kebijaksanaan bahwa aspek-aspek politik akan diselesaikan sendiri oleh Soekarno. Ini membuat keadaan semakin tidak menentu dan membuat keadaan ekonomi semakin memburuk. Perasaan tidak puas menggugah hati nurani para pemuda, dan tercetuslah Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) ( Nugroho Notosusanto, 1993 : 404).

Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu keamanan yang tidak ada, dan krisis ekonomi yang semakin parah, maka pada tanggal 11 Maret 1966 presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Menteri/ PANGAD Letjen Soeharto atas nama presiden / Panglima Tertinggi untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi (M.C. Ricklefs, 1991 : 319). Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 tersebut segera diambil tindakan untuk menyelesaikan masalah PKI. Dikeluarkannya SUPERSEMAR dianggap sebagai titik awal pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Berdasarkan latarbelakang

tersebut peneliti memfokuskan pada peranan Soeharto dalam bidang ekonomi th. 1966-1998 di Indonesia.

### **Keadaan Ekonomi Indonesia Sebelum Orde Baru**

Awal pemerintahan Indonesia setelah lepas dari kekuasaan penjajah dan gerakan revolusi yang besar diwarnai oleh berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang timbul hampir menyentuh seluruh segi kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi dan sosial maupun bidang politik (M.C. Ricklefs, 1981 : 48). Pada bidang ekonomi bangsa Indonesia berada pada titik yang paling rendah.

Keadaan ekonomi pada waktu itu sangat kacau balau, karena politik mercu suar dan konfrontasi mengganyang Malaysia. Inflasi sangat ganas, mencapai kelajuan lebih dari 600% tiap tahun. Pemerintah tidak berfungsi secara efisien, padahal jumlah menteri sampai 100 orang (Kabinet 100 Menteri). Usaha menaikkan daya beli rupiah pada akhir 1965 dengan mengadakan kurs baru (devaluasi) atas rupiah dengan perbandingan 1:1000 tidak menolong keadaan ( G. Moedjanto, 1989 : 145)

Keadaan di atas makin memprihatinkan akibat persoalan yang ditimbulkan oleh keadaan perpolitikan yang tidak menentu, sejak terbentuknya negara Indonesia, sudah beberapa kali terjadi perubahan dasar negara dan bentuk pemerintahan. Kemerostan ekonomi ini membuat masyarakat menderita. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah dalam memecahkan berbagai kemelut dalam negeri semakin meluas. Ketidakpuasan itu disalurkan lewat aksi-aksi (demonstrasi) massal pada tanggal 10 Januari 1966 di motori oleh KAMI yang non atau anti Komunis. Aksi-aksi itu berlangsung selama 60 hari. Mereka menyampaikan tuntutan rakyat yang tersusun dalam Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yakni bubarkan PKI, bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga-harga barang (G. Moedjanto, 1989 : 145).

G 30 S/PKI yang ingin melakukan kudeta menjadi dasar yang kuat bagi kelompok militer untuk mengambil alih sebagian roda pemerintahan karena negara dianggap dalam keadaan darurat. Kelompok militer ini dipimpin oleh Soeharto yang pada saat itu berpangkat Letnan Jenderal. Berdasarkan Tap MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968, maka sejak tanggal 27 Maret 1968 secara resmi Soeharto menduduki kursi kepresidenan (Ira Trionggo, 2012 : 104-105).

### Upaya Soeharto Meningkatkan Ekonomi Nasional

Menghadapi masalah ekonomi yang serius ini, Jendral Soeharto menarik beberapa ekonom muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk membuat perhitungan tentang seberapa besar masalah yang dihadapi agar dapat mengambil strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. (David Bourchier, 2007 : 236-237).

Orde Baru harus menjaga agar keamanan negara selalu membaik. Untuk itu konfrontasi melawan Malaysia perlu dihentikan. Keduanya sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik pada tahun 1967. Kesiapan damai juga menimbulkan simpati negara-negara lain, khususnya negara Barat. Penghentian konfrontasi kemudian diikuti dengan aktifnya kembali Indonesia di PBB. ( G. Moedjanto, 1989 : 169 ).

Kemudian strategi yang digunakan pemerintah Orde Baru yaitu mengadakan perjanjian penundaan pembayaran hutang-hutang negara asing dan usaha untuk mendapatkan kredit baru. Beberapa negara bersedia memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak. Di antara negara-negara tersebut ada yang tergabung dalam IGGI (*Inter Governmental Group for Indonesia*). IGGI didirikan oleh negara-negara kreditor yang non-komunis (Thee Kian Wie, 2004 : 49).

Demikian pula untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah mengesahkan dan menetapkan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyangkut tentang Penanaman Modal Asing (Thee Kian Wie, 2004 : 50). Kebijakan ini menarik para penanam modal asing baru untuk masuk ke negeri ini.

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun ( Nugroho Notosusanto, 1993 : 443)

Demikian pula untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah mengesahkan dan menetapkan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyangkut tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini berisi berbagai insentif dan jaminan kepada para calon investor asing. Di dalamnya termasuk masa bebas pajak dan jaminan tiadanya nasionalisasi, kecuali di anggap perlu bagi kepentingan nasional, itupun dengan kompensasi penuh sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (Thee Kian Wie, 2004 : 50). Kebijakan ini menarik para penanam modal asing baru untuk masuk ke negeri ini.

Sukses Orde Baru pada fase tumbuh tinggi ini tidak bisa terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Pada kurun waktu 1963 telah dirintis sebuah program yang dikenal dengan nama Revolusi Hijau yang menitik beratkan pada penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern (Retnowati Abdulgani, 2007 : 105). Kebijakan revolusi hijau menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan, baik itu dampak positif maupun negatif.

### **Berakhirnya Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional**

Pemerintahan Soeharto berlangsung selama enam periode, yaitu periode pertama (1968-1973), periode kedua (1973-1978), periode ketiga (1978-1983), periode keempat (1983-1988), periode kelima ( 1988-1993) dan periode keenam (1993-1998) dapat dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan sehingga beliau diangkat kembali menjadi presiden periode yang ketujuh untuk masa bhakti 1998-2003. Namun ketika pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, muncul badai krisis di Indonesia ( Ira Trionggo, 2012 : 115)

Krisis keuangan dan ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997/1998 dipicu oleh krisis kepercayaan investor dan kreditor asing terhadap stabilitas kurs baht Thailand yang kemudian mendorong *Bank of Thailand* (Bank dari Thailand) Bank Sentral Thailand mengambangkan baht. Melalui proses *contagion* krisis ini menjalar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia, yang juga terpaksa mengambangkan rupiah (Thee Kian Wie, 2004 : 71)

Krisis finansial Asia yang dimulai sejak tahun 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu. Akibatnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia (Ira Trionggo, 2012 : 135) Tampaknya penyelesaian krisis ekonomi Indonesia berlarut-larut. Hal ini karena krisis ekonomi disertai krisis kepercayaan yang akut terhadap kekuasaan yang sedang bekerja.

Besarnya tuntutan agar Soeharto mundur akhirnya terjawab pada tanggal 21 Mei 1998 setelah melalui proses yang panjang serta korban yang banyak. Namun pengunduran diri Soeharto ternyata tidak menjadi jawaban akhir bagi persoalan krisis ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali terjadi pergantian pemimpin di Indonesia ternyata krisis ekonomi tetap menjadi persoalan terberat yang harus dirasakan oleh rakyat Indonesia.

### **Kesimpulan**

Terjadinya krisis di Indonesia pada tahun 60-an akibat belum terciptanya stabilitas nasional dan belum terbentuknya suatu pemerintahan yang solid. Para pemegang kekuasaan disibukkan dengan persoalan politik dan kepartaian sehingga persoalan ekonomi diabaikan. Kemerosotan ekonomi ini membuat masyarakat menderita sehingga mengadakan demonstrasi. Pemberontakan G 30 S/PKI yang ingin melakukan kudeta menjadi dasar yang kuat bagi kelompok militer untuk mengambil alih sebagian roda pemerintahan karena negara dianggap dalam keadaan darurat. Kelompok militer ini dipimpin oleh Soeharto yang pada saat itu berpangkat Letnan Jenderal. Berdasarkan Tap MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968, maka sejak tanggal 27 Maret 1968 secara resmi Soeharto menduduki kursi kepresidenan

Awal pemerintahan Soeharto, ia berusaha menciptakan stabilitas di bidang politik ekonomi dan sosial budaya. Usaha menciptakan stabilitas politik dilakukan dengan berbagai cara diantaranya membersihkan aparat negara dari unsur komunis, melakukan reorganisasi ABRI, serta menyetatkan dan mentertibkan kehidupan kepartaian. Pemerintah Soeharto juga mengupayakan untuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan berusaha aktif di PBB. Stabilitas dibidang ekonomi dilakukan

dengan mengendalikan harga dan mempraktekkan anggaran berimbang. serta mengupayakan penangguhan pembayaran hutang. Pemerintah juga berusaha mendapatkan bantuan dana baru guna menyelenggarakan pembangunan melalui repelita.

Tidak bisa dipungkiri pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Soeharto telah mengangkat kesejahteraan rakyat, namun kemajuan tersebut semu sebab banyak penyelewengan dan praktek-praktek KKN yang berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Sedangkan timbulnya krisis ekonomi lebih disebabkan oleh hutang luar negeri yang besar, nilai tukar rupiah yang tidak stabil akibat, sistem perbankan yang buruk dan merosotnya nilai ekspor akibat tingginya biaya ekspor barang. Kegagalan pemerintah dan sikap para anggota lembaga tinggi negara lainnya mengakibatkan munculnya demonstrasi yang menuntut reformasi di segala bidang. Demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi tuntutan untuk mundurnya Soeharto yang terwujud pada tanggal 21 Mei setelah memakan banyak korban.

**Daftar Pustaka**

- Abdulgani, Retnowati. 2007. *Soeharto, Kehidupan dan Warisan Peninggalan Presiden Indonesia Kedua*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka
- Bourchier, David. 2007. *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta dan Pusat Studi Pancasila UGM
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta : LP3ES
- Moedjanto G. 1989. *Indonesia Abad ke-20 Jilid II, Dari Perang Kemerdekaan I Sampai Pelita II*, Yogyakarta : Kanisius
- Nugroho, Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI, Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Ricklefs M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Trionggo, Ira. 2012. *Rindu Soeharto*, Yogyakarta : Bangkit
- Wie, Thee Kian. 2004. *Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru*, Jakarta : Kompas